



Tinjauan Yuridis Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Secara Online Melalui Sisminbakum

Ivana¹, Richard Pratama Sumanli², Rovolin John³

^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta
¹01659220061@student.uph.edu, ²01659220023@student.uph.edu,
³01659220051@student.uph.edu

Abstract

Limited Liability Organization (PT) is a type of legal entity in Indonesia. An organization obtains the status of a legal element after its deed of establishment is ratified by the Minister of Public Regulations and Liberties. To obtain validation of the legal substance, the Public Accountant as the authorizer submits a request for sanctions for the establishment of a PT through the administration of the Legitimate Element Organizational Framework (Sisminbakum) data innovation electronically to the Minister of General Regulations and Freedoms by filling in Structure Model I (FIAN I). Implementing online legitimacy elements through Sisminbakum is another problem in Regulation no. 40 of 2007 concerning Risk-Limited Organizations, but in fact Sisminbakum has been active since around 2001, while UUPT no. 1 of 1995 does not regulate how to provide a deed of establishment of a PT either physically or electronically. The problem in this proposal is regarding the procedures for establishing a PT based on UUPT No. 40 of 2007, valid reasons for confirming the deed of establishment of a PT online via Sisminbakum, procedures for ratifying the deed of establishment of a PT from PT on the web and a valid belief to ratify the SK. PT authorized materials are marked electronically. Sisminbakum is an authority site which is an electronic framework for imposing sanctions on the basis of halal materials located at the Directorate General of General Legal Organizations (Dirjen AHU). The application for sanction for the deed of establishment of the organization is submitted by the Public Accountant through Sisminbakum by filling in the Structure Model I (FIAN I). The way to apply for FIAN I through Sisminbakum is: really pay attention to the name, then fill in the Pre-FIAN I Supporting Notes (IP FIAN Requirements) then fill in the information in the FIAN I process then make improvements and end with sending the Actual Report. If the actual record keeping is complete and meets the requirements, the Declaration will be signed electronically by the Minister of Regulations and Fundamental Freedoms and then sent to the public accountant who stated it. This PT endorsement letter of choice has strong power.

Abstrak

Organisasi Pertanggungjawaban Terbatas (PT) merupakan salah satu jenis badan hukum yang ada di Indonesia. Suatu organisasi memperoleh status unsur hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pendeta Peraturan dan Kebebasan Umum. Untuk mendapatkan pengesahan substansi hukum, Akuntan Publik selaku pemberi kuasa mengajukan permohonan sanksi pendirian PT melalui administrasi inovasi data Kerangka Organisasi Unsur Sah (Sisminbakum) secara elektronik kepada Pendeta Peraturan dan Kebebasan Umum dengan mengisi Model Struktur I. Penyelenggaraan legitimasi unsur legitimasi secara online melalui Sisminbakum merupakan permasalahan lain dalam Peraturan No. 40 Tahun 2007 tentang Organisasi yang Dibatasi Risiko, namun sebenarnya Sisminbakum sudah aktif sejak sekitar tahun 2001, sedangkan UUPT No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur cara pemberian akta pendirian PT baik secara fisik maupun elektronik. Permasalahan dalam usulan ini adalah mengenai tata cara

Article History

Received: Oktober 2023
Reviewed: Oktober 2023
Published: November 2023

Key Words

Juridical Review, Limited Liability Company (PT), Legalization of Deed of Establishment, Sisminbakum

Sejarah Artikel

Received: Oktober 2023
Reviewed: Oktober 2023
Published: November 2023

Kata Kunci

Tinjauan Yuridis, Perseroan Terbatas (PT), Legalisasi Akta Pendirian, Sisminbakum



pendirian PT berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007, alasan hukum untuk mengukuhkan akta pendirian PT secara online melalui Sisminbakum, tata cara pengesahan akta pendirian PT. dari PT di web dan keyakinan hukum untuk mengesahkan SK. Bahan sah PT ditandai secara elektronik. Sisminbakum merupakan situs otoritas yang merupakan kerangka elektronik untuk pemberian sanksi atas dasar bahan halal yang bertempat di Direktorat Jenderal Organisasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Permohonan sanksi akta pendirian organisasi diajukan oleh Akuntan Publik melalui Sisminbakum dengan mengisi Model Struktur I (FIAN I). Cara yang harus dilakukan dalam pengajuan FIAN I melalui Sisminbakum adalah: benar-benar memperhatikan namanya, kemudian mengisi Catatan Pendukung Pra FIAN I (Keperluan IP FIAN) kemudian mengisi informasi di FIAN Saya proses kemudian melakukan perbaikan dan diakhiri dengan pengiriman Laporan Aktual. Apabila pencatatan yang sebenarnya telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Deklarasi akan ditandatangani secara elektronik oleh Pendeta Peraturan dan Kebebasan Dasar dan kemudian dikirimkan kepada akuntan publik yang menyebutkannya. Surat pilihan pengesahan PT ini memiliki kekuatan yang kuat.

Pendahuluan

Tujuan umum kemajuan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tersebar secara merata. Untuk memahami bantuan pemerintah di daerah, maka diyakini bahwa Organisasi Perseroan Terbatas (PT) dapat menjadi salah satu penopang utama pembangunan ekonomi masyarakat, karena Perseroan Terbatas merupakan elemen bisnis yang penting dan dapat diakses secara luas di dunia, termasuk Indonesia (Butarbutar, 2022). Kehadiran PT sebagai wahana bisnis memberikan kontribusi praktis pada seluruh aspek kehidupan manusia. Organisasi Tanggung Jawab Terbatas telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan bantuan pemerintah di daerah setempat dan membuat komitmen penting terhadap kemajuan finansial dan sosial. Organisasi Kewajiban Terbatas (Restricted Obligation Organization) merupakan salah satu elemen bisnis yang agak dominan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, karena organisasi tersebut mempunyai kualitas, atribut, dan kehormatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh jenis substansi bisnis yang lain, khususnya: suatu jenis organisasi adalah suatu badan hukum, merupakan suatu bermacam-macam modal atau penawaran, mempunyai sumber daya yang independen terhadap sumber daya pemegang saham, investor mempunyai tanggung jawab terbatas, terdapat pembagian kemampuan antara pemegang saham dan dewan atau pimpinan, mempunyai hakim yang berkemampuan sebagai manajer, kekuasaan tertinggi ada pada Pertemuan Komprehensif Investor (RUPS).

Organisasi dengan Tanggung Jawab Terbatas umumnya digunakan oleh manajer keuangan untuk mendirikan organisasi mereka, karena PT mengambil beberapa manfaat yang membuatnya sangat menarik. Di Indonesia, struktur Organisasi Risiko Terbatas lebih umum digunakan atau disukai. Ada beberapa alasan mengapa PP jenis ini disukai, antara lain karena PP sebagai badan usaha yang berstatus halal membatasi risiko bagi pemilik atau investornya, sehingga investor tidak perlu fokus mengatur satu organisasi tertentu, namun pada dasarnya



melayani organisasi. latihan sehari-hari kepada direktur yang berbakat, sedangkan pendukung keuangan atau financial backer dapat menerima posisi sebagai Hakim atau Ketua Badan Pimpinan dari asosiasi yang bersangkutan.

Sisminbakum merupakan situs kuasa yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Organisasi Hukum Umum, Administrasi Administrasi dan Peluang Penting Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Jenderal AHU (Nabawi, 2022). Sisminbakum dibuat mengingat kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga memerlukan pengorganisasian, khususnya dalam memberikan persetujuan atau perubahan terhadap zat halal secara cepat dan pasti. Sebelum tahun 2001, cara paling umum untuk menyetujui penetapan halal telah dilakukan. sebenarnya itu memerlukan investasi. Menurut sudut pandang pemegang buku publik, siklus afirmasi yang seluruhnya berlokasi di Jakarta ini memakan waktu yang sangat lama. Menurut pandangan para pekerja AHU Ketum, hal ini dapat membuat ribuan lamaran ditunda ke puncak karena dokumen yang datang tidak sesuai dengan jumlah delegasi yang ada. Dalam kondisi seperti ini, Kebingungan Manusia tidak dapat dihindari sehingga data yang ada tidak berdasar dan eksekusi manual juga menimbulkan fitnah dan konspirasi di antara perwakilan Kursi Jenderal AHU, terutama dengan asumsi otoritas yang sah memerlukan persetujuan cepat dari komponen sah yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, dengan kemajuan, dibuatlah sistem berbasis web melalui jaringan web yang dapat diakses oleh setiap otoritas sah yang terdaftar di sisminbakum dari seluruh Indonesia.

Bagi pemerintah yang sah, dengan adanya fasilitas ini, para akuntan publik di seluruh Indonesia dapat terhubung langsung dari daerah masing-masing untuk mempersingkat waktu dan jarak tempuh. Data hierarki yang dimasukkan disimpan dengan benar dan sesuai dalam koleksi informasi. Dengan sistem ini, KKN yang selama ini diusut bisa dijauhkan dengan alasan segala sesuatunya diawasi melalui struktur ini. Game plan yang memberikan dasar pemikiran dan pemahaman lebih lanjut mengenai sanksi terhadap organisasi secara elektronik melalui pelaksanaan pengembangan informasi bagi komponen asli struktur hierarki diarahkan pada Pasal 9 dan 10 Pedoman Resmi Nomor 40 Tahun 2007. Sementara itu, mulai sekitar tahun 2001, legitimasi elektronik terhadap perkumpulan telah dilakukan. melalui organisasi pengembangan informasi, sistem pengaturan substansi yang sah saat ini telah selesai. Sementara itu, dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 tentang cara pengukuhan akta pendirian PT tentu tidak ada pasal yang mengaturnya, tidak masuk akal apakah dilakukan secara umum atau secara elektronik. Organisasi mekanis saat ini adalah pisau yang memotong dua cara yang berbeda karena alasan selain penambahan bantuan pemerintah yang diperluas, kemajuan, misalnya, mengenai sanksi terhadap komponen yang sah, dan pergantian peristiwa yang manusiawi, juga merupakan teknik yang meyakinkan untuk mengabaikan hukum. Praktek di web merupakan kegiatan virtual yang mempunyai dampak nyata meskipun buktinya bersifat elektronik. Oleh karena itu, pemanfaatan web harus dikoordinasikan secara sah dan diberi payung hukum. Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Keseluruhan mengatur mengenai pembuktian yang dapat diajukan dalam perkara permulaan,



yaitu pembuktian tertulis, pembuktian saksi, pertanyaan, pengakuan dan komitmen. Dengan memperhatikan pasal ini, maka belum ada aturan yang secara tegas menegaskan data elektronik dan merek elektronik.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data pada masalah-masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait serta Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus (Marune, 2023).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada sistem manual atau sistem yang lama, segala pekerjaan dilakukan dengan teliti, mulai dari memperoleh laporan dari pejabat yang sah yang meliputi pengecekan kulminasi dan nama, porsi dan pembuatan kartu kendali (Widjaja, 2020). Berkas pada siklus manual ini masih berupa laporan, meliputi penilaian, persetujuan dan laporan. Kemudian editor dibagikan dengan benar-benar fokus pada puncak laporan-laporan ini, khususnya surat yang menyebutkan dukungan asosiasi dan kepuasan berbagai catatan yang disampaikan oleh perintis atau delegasi, dalam hal ini Pembukuan Umum. Selain itu, catatan-catatan tersebut akan diperiksa secara menyeluruh oleh Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Subdit (Kasubdit) untuk mengetahui komponen-komponen yang sah yang nantinya akan dipahami oleh Pengelola Usaha Keseluruhan, yang dilanjutkan dengan pencetakan Surat Pernyataan. Surat yang akan disahkan oleh Direktorat Jenderal, pada akhirnya Pejabat yang Sah akan mengambil Keputusan Perkumpulan dan Akta Notaris akan dipertanggungjawabkan pada bagian Perkumpulan. Untuk mengatasi kerjasama yang sangat panjang ini, dengan memanfaatkan kemajuan yang semakin maju, dibuatlah sistem berbasis web yang dapat diakses oleh semua orang. Pembukuan Umum di seluruh Indonesia, khususnya melalui Sisminbakum.

Melalui Sisminbakum seluruh siklus pertemuan dilakukan secara online dan dapat diakses oleh pemegang buku terbuka yang mengikuti sisminbakum dari seluruh Indonesia. Setiap Pejabat Sah yang terdaftar di Sisminbakum akan diberikan Client ID dan Mystery



Word untuk keamanan selama pengurusan. Pembukuan Umum dapat melakukan administrasi koordinatif melalui jaringan web selama 24 jam dengan tekad dapat mengetahui kemajuan pekerjaannya dan apabila terdapat kesalahan dapat diperbaiki secara lugas serta korespondensi antar Ketua Umum, AHU dan Pejabat yang Sah melalui email. Pengerjaan unsur-unsur sah suatu organisasi dilakukan oleh pemegang buku umum sebagai wakil sah perintis. Permohonan untuk mendapatkan Penegasan Damai berkenaan dengan pengesahan suatu komponen yang sah harus diajukan kepada Imam paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penandaan akta. Apabila permohonan untuk memperoleh Pernyataan Damai tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan akta pendirian, maka pada saat itu, sekitar waktu itu, akta pendirian itu menjadi tidak sah setelah jangka waktu tersebut. rentang waktu telah berlalu dan asosiasi tersebut belum memperoleh status sebagai Badan Usaha yang Diklaim Negara. Komponen-komponen yang sah dipisahkan oleh pedoman dan pengaturannya diselesaikan oleh perintis.

Mengenai apa yang terlihat pada acara-acara umum, hal ini diatur secara lengkap dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Umum, Pasal 164 HIR, yang meliputi pembuktian tertulis, pembuktian dengan saksi, keraguan, pengakuan, jaminan. Bukti yang disampaikan di luar ketentuan pedoman: tidak bersifat substansial sebagai alat bukti, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian untuk memperkuat kebenaran pengaduan atau pembatalan yang diajukan. Bukti tertulis diserahkan dalam permohonan mendasar. Hal ini karena jenis surat atau akta pada umumnya memegang peranan penting. Memperhatikan hukum tentang pembuktian tertulis (menghitung penjelasan) atau akta (Arifin dan Witasari, 2019).

Merek elektronik atau high level brand mengandung prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jaminan bahwa siapa pun yang memproses melalui Sisminbakum benar-benar pihak yang berhak dan dapat melakukannya. Permasalahan sah yang mungkin muncul pada merek elektronik ini berkaitan dengan kewajarannya dan apakah merek tersebut dapat digunakan sebagai bukti utama jika ada pertanyaan. Tanda-tanda elektronik dalam menentukan keabsahan pendirian suatu PT mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Sebab, jika mencermati penjelasan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Asosiasi tersebut, disebutkan bahwa merek elektronik adalah merek yang digabungkan atau dikaitkan dengan informasi elektronik oleh kantor yang disetujui. dan menunjukkan legitimasinya. data sebagai gambar elektronik unik dari otoritas yang didukung yang dibuat melalui media PC.

Merek elektronik mempunyai kekuatan yang sangat sah seperti merek biasa yang menggunakan tinta basah dan stempel. Peraturan yang sampai saat ini menjamin keabsahan atau kepastian hukum Pengundangan Perseroan Terbatas ini adalah Peraturan Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP). Pasal 1 angka (2) UUDP menyatakan bahwa laporan organisasi adalah informasi atau catatan dan atau informasi dibuat atau mungkin didapat sehubungan dengan menyelesaikan latihannya, baik disusun di atas kertas atau dengan cara lain atau disimpan dalam bentuk apa pun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dalam pasal tersebut diketahui bahwa laporan organisasi bukan sekedar informasi, catatan, atau data yang diperoleh perusahaan yang bersangkutan. Apalagi, Pasal 12 ayat (1)



UU DP mengatur bahwa dokumen perusahaan dapat dipindahkan ke mikrofilm atau media lain (Hutahaean, 2022).

Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) UU DP mengatur bahwa laporan organisasi yang diedarkan dalam bentuk miniatur film atau media lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) beserta cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Jadi dokumen-dokumen suatu organisasi (termasuk akta pendirian) yang disampaikan dengan menggunakan sarana elektronik merupakan bukti yang sah. Pasal 15 ayat (1) UU DP sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa data elektronik atau berpotensi arsip elektronik serta hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan acara yang berlaku di Indonesia. Dengan hadirnya Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 maka keseluruhan peraturan perundang-undangan pembuktian yang dianut kini berkembang ke arah pembuktian terbuka, yaitu dengan mengintegrasikan pembuktian masa kini yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, seperti pembuktian elektronik (electronic proof), termasuk data elektronik (electronic information), catatan elektronik (dokumen elektronik), serta semua jenis sistem PC yang dapat dibaca (struktur bermakna kerangka PC).

Kesimpulan

Melihat hasil dan perbincangan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa Melihat gambaran di masa lalu, ada kecenderungan untuk berpikir bahwa dalam membangun sebuah perseroan terbatas, penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang masMulai sekitar tahun 2001, pengesahan akta pendirian PT dibantu melalui organisasi inovasi data dalam struktur perkumpulan substansi yang sah (SISMINBAKUM). Sisminbakum yang disahkan berdasarkan Deklarasi Imam tentang Keseimbangan dan Kesempatan Penting Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01. 2000 tentang Prasyarat Struktur Kepengurusan Substansi Halal pada Direktorat Jenderal Perkumpulan Kewarganegaraan, Administrasi Hukum dan Umum Republik Indonesia, telah diperkuat dengan Pedoman Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perkumpulan Tanggung Jawab Terbatas sebagai alasan yang sah untuk cara yang paling umum dilakukan. meletakkan PT dengan praktis tidak ada inkonsistensi. Sementara itu, aturan tegas dalam melaksanakan Sisminbakum juga diatur dalam Peraturan Imam tentang Pedoman dan Kebebasan Umum Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Komponen Sah dan Sanksi Pemasarakatan Sisminbakum. Rencana Pembelanjaan Anak Perusahaan, Kenyamanan, Peringatan Ganti Rugi Rencana Keuangan Anggota dan Data Perubahan Resmi. Sisminbakum adalah Sistem Hierarki Zat Halal yang menggunakan struktur elektronik melalui jaringan web melalui penyelesaian komponen-komponen yang sah termasuk permintaan pengukuhan akta pendirian PT (FIAN 1), dan permohonan pengesahan (FIAN 2), serta akomodasi laporan akta perubahan rencana keuangan hubungan PT (FIAN 3). Pengukuhan akta pendirian melalui sisminbakum memberikan manfaat yang mengesankan bagi Ketua Umum AHU dan pihak yang berwenang. Mengenai manfaat dalil Minbakum, khususnya mengembangkan lebih



lanjut penyelenggaraan pemerintahan teritorial agar lebih bermanfaat dan cakap, tepat, cepat dan sederhana.

Saran

Sementara itu, kendala umum yang sering dialami pengguna sistem ini adalah lamanya penumpukan. Permohonan sanksi akta pendirian perseroan diajukan oleh akuntan publik melalui Sisminbakum dengan menyelesaikan Model Struktur I (FIAN I). Model Fian I adalah organisasi penyelesaian akta resmi hukum yang berkemampuan dalam hal pendirian Organisasi Kewajiban Terbatas untuk mendapatkan pengesahan dari Imam Hukum dan Kebebasan Umum.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., & Witasari, A. (2019). Notary Role In Making The Establishment Of The Deed Of Business Cooperation In The Rembang District. *Jurnal Akta*, 6(3), 324746.
- Butarbutar, E. (2022). Juridical Review of the Legalization of the Deed of Establishment of a Limited Liability Company on-Line through the Sisminbakum. *Journal of Law Science*, 4(3), 146-159.
- Hutahaean, B. L. (2022). Liability Of A Doctor Who Perform A Malpractice (A Review Under Health Law). *Journal of Law Science*, 4(3), 160-170.
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81.
- Nabawi, M. F. (2022). Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha Dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik.
- Widjaja, G. (2020, May). The Acknowledgement of Corporation's Register Maintained by the Ministry of Law and Human Rights as Authentic Evidence in Court of Law. In *Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)* (pp. 291-293). Atlantis Press.